

STUDI TENTANG KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT BERPRESTASI DI INDONESIA

Study of the Achievement Cooperative on Smallholder Oil Palm Plantation in Indonesia

Suharno, Yuprin A.D dan Trisna Anggreini

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

e-mail: suharno_unpar@yahoo.com

ABSTRACT

The existence of cooperatives is proven to increase the success of smallholders' palm plantations through the application of good agricultural practices (GAP) and good management practices (GAP). The purpose of this study is to examine the factors that determine the success of cooperatives and the role of cooperatives in improving the welfare of its members and communities around. The research was conducted in three palm oil plantation cooperatives in Indonesia: (1) KUD Dwi Tunggal in Tania Makmur Village, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera; (2) KUD Tani Subur in Pangkalan Tiga Village, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan; (3) KUD Jaya Makmur in Kumbara Utama Village, Siak Regency. The selection of the sample cooperative is deliberately determined on the basis that the cooperatives are a nationally achieving cooperative based on a credible source of information. This study found that the factors that determine the success of these cooperatives are: (1) Background history of establishment of cooperatives; (2) Trust members to cooperative management; (3) Cooperative partnership between cooperatives with plantation companies and companies providing agricultural production facilities; (4) Implementation of GAP and GMP. The research also found that the existence of the palm oil plantation cooperatives proved able to improve the welfare of its members through the increase of their household income from the plantation activity, which ranged from Rp 29.5 million/ year to Rp 33.6 million / year. The existence of cooperatives also have a positive impact on the socio-economic life of the community through: (1) improvement of infrastructure supporting economic and socio-cultural activities; (2) improvement of housing condition of the population; (3) all households of oil palm plantations have two-wheeled vehicles and some of them have four-wheeled vehicles (cars); (4) about 10% of farmers' children are able to finish their education until university; (5) for the many Moslem farmers have performed the pilgrimage or umroh, or already recorded in the waiting list to perform the pilgrimage.

Key words: palm oil plantations; national achievement cooperatives; socio-economic impact

ABSTRAK

Keberadaan koperasi terbukti mampu meningkatkan keberhasilan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui penerapan praktik pertanian yang baik dan praktik manajemen yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Penelitian dilakukan di tiga koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat berprestasi di Indonesia, yaitu: (1) KUD Dwi Tunggal di Desa Tania Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; (2) KUD Tani Subur di Desa Pangkalan Tiga Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; (3) KUD Jaya Makmur di Desa Kumbara Utama Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pemilihan koperasi sampel ditetapkan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa koperasi-koperasi tersebut merupakan koperasi berprestasi tingkat nasional berdasarkan sumber informasi yang kredibel. Penelitian ini

menemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi-koperasi tersebut antara lain: (1) Latar belakang sejarah berdirinya koperasi; (2) Kepercayaan anggota kepada pengurus koperasi; (3) Kerjasama kemitraan antara koperasi dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan penyedia sarana produksi pertanian; (4) Praktik pertanian yang baik dan praktik manajemen yang baik. Penelitian juga menemukan bahwa keberadaan koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan pendapatannya, yaitu berkisar antara Rp 29,5 juta/tahun sampai dengan Rp 33,6 juta/tahun. Keberadaan koperasi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui: (1) peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi maupun sosial budaya; (2) peningkatan kondisi perumahan penduduk; (3) semua rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit memiliki kendaraan bermotor roda dua dan sebagian kecil memiliki kendaraan bermotor roda empat (mobil); (4) sekitar 10% anak-anak petani perkebunan mampu menamatkan pendidikannya sampai perguruan tinggi; (5) bagi petani yang beragama islam sudah banyak yang menunaikan ibadah haji atau umroh, atau sudah tercatat dalam daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji.

Kata-kata kunci: perkebunan kelapa sawit rakyat; koperasi berprestasi nasional; dampak sosial ekonomi

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2016), nilai ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2015 sebesar USD 15,4 juta, atau sekitar 11,67% dari total nilai ekspor non-migas yang mencapai USD 131,8 juta (Kementerian Perdagangan, 2016). Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2015 sebesar 11,3 juta ha yang terdiri atas perkebunan besar seluas 6,7 juta ha (59,51%) dan perkebunan rakyat seluas 4,6 juta ha (40,49%). Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit adalah sebanyak 1,5 juta Kepala Keluarga, ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi bagian penting dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di negeri ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, khususnya perkebunan rakyat di Indonesia adalah masih rendahnya produktivitas tanaman yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2015), produktivitas rata-rata perkebunan rakyat kelapa sawit pada tahun 2015 hanya sebesar 3,32 ton CPO/ha/tahun, atau sekitar 16,56 ton

TBS/ha/tahun. Sementara menurut Kiswanto dkk.(2008), dengan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar potensi produktivitas tanaman kelapa sawit dapat mencapai 22 ton TBS/ha/tahun atau setara dengan 4.80 ton CPO/ha/tahun. Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat ini diduga disebabkan oleh tidak dilaksanakannya praktik pertanian yang baik (GAP) dan praktik manajemen yang baik (GMP) akibat kurangnya pengetahuan petani dan keterbatasan permodalan yang dimiliki.

Implementasi konsep GAP dan GMP dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dapat ditempuh dengan menerapkan konsep kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunaaan rakyat dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 2014¹ Tentang Perkebunan, Pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan perkebunan untuk melakukan kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan petani pekebun dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta

¹Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Perkebunan

saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha perkebunan tersebut dapat berupa pola kerjasama penyediaan sarana produksi; kegiatan produksi; pengolahan dan pemasaran; kepemilikan saham; dan jasa pendukung lainnya.

Hasil penelitian dari Tim Peneliti PILAR dan CPI di Kalimantan Tengah (2015) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri yang tidak menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibanding dengan perkebunan kelapa sawit rakyat yang menjalin kemitraan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan akses yang dihadapi oleh petani swadaya, seperti keterbatasan akses terhadap penyediaan sarana produksi pertanian, keterbatasan akses finansial dan akses pasar, serta kurangnya pengetahuan petani tentang praktik pertanian yang baik. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa di Kalimantan Tengah terdapat tiga model kemitraan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan perusahaan perkebunan besar, yaitu: (1) Skema kemitraan dimana usaha perkebunan dikelola oleh koperasi; (2) Skema kemitraan individual; dan (3) Skema kemitraan dimana usaha perkebunan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan. Dari ketiga model/skema kemitraan tersebut, skema kemitraan yang dikelola oleh koperasi menunjukkan performa yang lebih baik dari segi produktivitas tanaman, pendapatan petani dan manajemen risiko.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan suatu kajian lebih lanjut tentang skema koperasi petani perkebunan kelapa sawit rakyat yang berpretasi, khususnya untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi-koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Mengkaji faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat yang meliputi: (a) Pra-kondisi koperasi yang meliputi: kondisi

geografis; kondisi sosial ekonomi dan budaya; dan sejarah perkembangan koperasi; (b) Operasional koperasi yang meliputi: manajemen koperasi; unit usaha dan kondisi finansial koperasi; rantai pasok sarana produksi dan pemasaran hasil; dan manajemen risiko; (c) Sistem penunjang yang meliputi: infrastruktur; kemitraan, dan jejaring usaha; (2) Menganalisis dampak sosial ekonomi (kesejahteraan) anggota koperasi dan masyarakat sekitar, yang meliputi pendapatan petani, kondisi perumahan, pemilikan aset rumah tangga, tingkat pendidikan anak, dan indikator kesejahteraan sosial lainnya.

METODOLOGI

Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus atas 3 (tiga) koperasi perkebunan kelapa sawit rakyat berpretasi di Indonesia. Koperasi-koperasi sampel dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan rekomendasi dari perusahaan-perusahaan mitra/pembina dan sumber lain yang kredibel. Ketiga koperasi tersebut adalah:

1. KUD Dwi Tunggal di Desa Tania Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawah binaan PT. Tania Selatan (Wilmar Group), yang telah memperoleh Serifikat RSPO tahun 2015.
2. KUD Tani Subur di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan perusahaan mitra PT. Meta Epsi Agro (MEA) dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sabut Mas Abadi (SMA) yang merupakan anak perusahaan dari MEDCO group. KUD Tani Subur mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik nasional tahun 2014 dan memiliki unit usaha yang cukup banyak, serta telah menerapkan konsep Integrasi Sawit-Sapi.

3. KUD Jaya Makmur di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau dibawah binaan PT. Inti Indosawit Subur (IIS), anak perusahaan dari Asian Agri, mendapatkan penghargaan sebagai koperasi terbaik nasional tahun 2013, dan melalui kerjasama kemitraan dengan PT. Inti Indosawit Subur, KUD Jaya Makmur telah memperoleh sertifikat *International Sustainability And Carbon Certification* (ISCC), serta memperoleh sertifikat *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada tahun 2015.

Indikator-Indikator yang Dikaji

Indikator-indikator yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pra-kondisi koperasi yang meliputi: kondisi geografis; kondisi sosial ekonomi dan budaya; dan sejarah perkembangan koperasi.
- 2) Operasional koperasi yang meliputi: manajemen koperasi; unit usaha dan kondisi finansial koperasi; rantai pasok sarana produksi dan pemasaran hasil; dan manajemen risiko.
- 3) Sistem penunjang yang meliputi: infrastruktur; kemitraan, dan jejaring usaha.
- 4) Dampak sosial ekonomi (kesejahteraan) anggota koperasi dan masyarakat sekitar, seperti kondisi perumahan, kepemilikan aset rumah tangga, tingkat pendidikan anak, dan indikator kesejahteraan sosial lainnya.

Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi primer dilakukan dengan metode diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa responden terpilih. FGD diikuti oleh peserta sekitar 14-15 orang di setiap koperasi sampel

yang mewakili Pengurus Koperasi, Badan Pengawas, perwakilan dari perusahaan mitra/pembina, perwakilan dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan perwakilan petani/anggota koperasi. Sedangkan *in-depth interview* dilakukan terhadap pengelola unit usaha, anggota badan pengawas dan perwakilan petani, yaitu ketua kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari bagian administrasi koperasi, kelompok tani dan sumber lain yang sesuai, termasuk dari perpustakaan dan internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Utama yang Menentukan Keberhasilan Koperasi

(1) Latar Belakang Sejarah Berdirinya Koperasi

Pendirian ketiga koperasi sampel tersebut, yaitu: KUD Dwi Tunggal, KUD Tani Subur dan KUD Jaya Makmur, tidak terlepas dari keberadaan Program Pengembangan Perkebunan Rakyat dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau biasa disebut Program PIR-Trans. Khusus untuk KUD Tani Subur, proyek PIR-Trans yang dikembangkan di daerah tersebut pada tahun 1984 adalah perkebunan lada, namun mengalami kegagalan, sehingga KUD Tani Subur dalam kondisi tidak aktif. Sejalan dengan dilaksanakan proyek PIR-Trans Kelapa Sawit tahun 1996 di daerah ini, maka keberadaan KUD Tani Subur diaktifkan kembali dengan Akta Perubahan baru Nomor: 395/PAD/KWK.15/X/1996, tanggal 16 Oktober 1996. Selain itu, pembentukan koperasi-koperasi tersebut didasari oleh kebutuhan bersama oleh para anggota karena mereka merasa perlu bekerja sama untuk mengelola kebun dan tanaman kelapa sawit yang di awal pembangunannya secara umum masih merupakan komoditas baru yang belum pernah mereka usahakan sebelumnya.

Perkembangan koperasi-koperasi tersebut berbeda-beda tergantung dari manajemen pengurus koperasi dan kesepakatan anggota. Misalnya tentang keanggotaan koperasi, di KUD Dwi Tunggal dan KUD Jaya Makmur anggota koperasi dibatasi pada petani plasma saja, sedangkan

di KUD Tani Subur tidak dibatasi hanya petani plasma, melainkan anggota masyarakat lain yang bukan petani plasma juga boleh menjadi anggota koperasi. Deskripsi perkembangan koperasi sampel selengkapnya terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Perkembangan Koperasi Sampel

Kriteria	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Tahun Didirikan	1997	1984/1996	1992
Lokasi	Desa Tania Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komerling Ilir Sumatera Selatan	Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Kerinci Provinsi Riau
Jumlah Petani Plasma saat pendirian (orang)	650	435	460
Jumlah Kelompok Tani (kelompok)	28	18	20
Total Luas Kebun Plasma (ha)	1,300	870	920
Jumlah Anggota KUD di Tahun 2016 (orang)	650	821	460
Jumlah Unit Usaha Tahun 2015 (Unit)	4	6	3
Prestasi Terbaik	Bersama-sama dengan koperasi lain yang tergabung dalam Perhimpunan Sapta Tunggal Mandiri, KUD Dwi Tunggal telah memperoleh sertifikat RSPO untuk skema petani kecil mandiri tahun 2015 (<i>Certified as Independent Smallholder Scheme in 2015</i>).	1. Penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2012 sebagai Koperasi Berprestasi Nasional untuk Kelompok Produsen; 2. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014.	1. Penghargaan atas koperasi berprestasi jenis jasa tahun 2013 dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. 2. Bersama dengan PT Inti Indosawit Subur (Asian Agri Group) sebagai Perusahaan Pembinaan. KUD Jaya Makmur memperoleh sertifikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dan sertifikat RSPO

(2) *Kondisi Geografis, Infrastruktur dan Sosial Ekonomi*

Berdasarkan kondisi geografis dan klimatologis, semua wilayah kerja koperasi-koperasi sampel berada di dataran rendah dengan ketinggian wilayah berkisar antara 14-44 meter di atas permukaan laut, dengan kontur tanah secara umum datar dan bergelombang, sedangkan kondisi klimatologi berupa iklim tropis basah dengan yang secara umum sesuai untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit, serta jenis tanah berupa tanah mineral yang sesuai untuk kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit.

Dari segi sosio-kultural, sebagian besar petani yang tergabung dalam KUD merupakan penduduk pendatang (transmigran) dan juga melibatkan sekitar 10-20% penduduk lokal. Hal ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Perkebunan Rakyat dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No.2 tahun 1984², dimana Program PIR-Trans wajib melibatkan penduduk lokal ditujukan untuk meminimalisir potensi konflik sosial yang disebabkan oleh kecemburuan sosial.

Dari segi sosial ekonomi, khususnya yang terkait dengan sumber penghasilan atau mata pencaharian penduduk, sumber penghasilan anggota KUD selain dari pengelolaan kebun plasma yang dimilikinya juga bersumber dari kegiatan-kegiatan produktif lainnya, yaitu: berusahatani kebun karet; berusahatani tanaman pangan dan hortikultura; bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, baik sebagai buruh perusahaan perkebunan atau sebagai buruh perkebunan yang dikelola oleh KUD, dan berwirausaha, seperti berdagang atau membuka usaha jasa, misalnya bengkel, ojek

dll. Gambaran umum Pra-kondisi geografi dan sosial ekonomi di ketiga koperasi sampel seperti terlihat pada Tabel 2.

Manajemen Operasional Koperasi(1) *Struktur Tata Kelola Koperasi*

Dalam manajemen koperasi, pemegang kekuasaan tertinggi pada KUD terletak pada Rapat Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Koperasi³. Susunan organisasi koperasi pada level Top Manajemen terdiri atas Ketua, Badan Pengawas dan Pembina/Pelindung. Pada level *Middle Management* terdapat Kepala-kepala Unit atau bidang usaha yang bertanggung jawab atas operasional masing-masing unit usaha, dan khusus untuk Unit Usaha Plasma, pada level *Low Management* terdapat Ketua Kelompok Tani yang bertanggung jawab atas operasional kebun plasma di lapangan.

Faktor kepercayaan anggota kepada pengurus koperasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan koperasi. Hal ini terbukti dari ketiga koperasi (KUD) sampel yang menjadi objek penelitian ini, bahwa pengurus koperasi, khususnya ketua koperasi dalam pemilihan pengurus yang dilaksanakan secara demokratis pada forum Rapat Anggota, dipercaya oleh anggota untuk memimpin koperasinya lebih dari satu periode.

(2) *Operasional Kebun Plasma*

Pananggung jawab pengelolaan kebun plasma di lapangan adalah Ketua kelompok tani, sedangkan pelaksanaannya untuk masing-masing KUD berbeda-beda. Kelompok Tani adalah gabungan petani sehamparan yang anggotanya adalah para petani plasma. Pada usaha perkebunan, wilayah kerja kelompok tani dapat disamakan dengan satu afdeling. Pada KUD Dwi Tunggal dan KUD Tani Subur, pengelolaan

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1986, Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans),

³ Pasal 22 Undang-undang Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

operasional kebun di lapangan dilaksanakan oleh kelompok tani, sedangkan di KUD Jaya Makmur, operasional pengelolaan kebun oleh masing-masing individu petani plasma dibawah koordinasi Ketua kelompok tani. Dalam pengelolaan kebun plasma, KUD

bertanggung jawab dalam pengadaan sarana produksi, penjadwalan rotasi panen dan pemasaran TBS dari kebun plasma yang dikelolanya. Deskripsi manajemen koperasi dan pengelolaan kebun plasma untuk ketiga koperasi sampel seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Penilaian Pra-Kondisi Koperasi Sampel

Kriteria	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Topografi	Bergelombang	Bergelombang	Bergelombang
- Ketinggian Tempat (m)	15	20	44
- Iklim	tropik basah	tropik basah	tropik basah
- Rata-rata Curah Hujan Tahunan (mm)	2,906	2,310	1,971
- Jumlah Hari Hujan (hari)	116	181	191
- Temperatur (°C)	21-36	20-36	25-37
Kelembapan (%)	69-98	61- 66	82-95
Jenis Tanah	tanah mineral	tanah mineral	tanah mineral
Tingkat Keseuaian untuk Tanaman Kelapa Sawit	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Kondisi Sosial-Ekonomi dan Kultural	<p>Anggota Koperasi melibatkan 80% penduduk pendatang (transmigransi) dan 20% penduduk lokal.</p> <p>Sumber pendapatan anggota koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usahatani kebun kelapa sawit - Usahatani kebun karet - Buruh perkebunan kelapa sawit. - Berwirausaha (dagang dan usaha jasa). 	<p>Anggota Koperasi melibatkan 80% penduduk pendatang (transmigransi) dan 20% penduduk lokal.</p> <p>Sumber pendapatan anggota koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usahatani kebun kelapa sawit - Usahatani kebun karet - Usahatani tanaman pangan dan hortikultura - Usahatani ternak - Buruh perkebunan kelapa sawit. - Berwirausaha (dagang dan usaha jasa). 	<p>Anggota Koperasi melibatkan 90% penduduk pendatang (transmigransi) dan 10% penduduk lokal.</p> <p>Sumber pendapatan anggota koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usahatani kebun kelapa sawit - Usahatani ternak sapi - Buruh perkebunan kelapa sawit. - Berwirausaha (dagang dan usaha jasa).

Tabel 3. Deskripsi Manajemen Koperasi dan Pengelolaan Kebun Plasma

Kriteria	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Manajemen Koperasi			
- Pemegang Kekuasaan Tertinggi	Rapat Anggota	Rapat Anggota	Rapat Anggota
- Manajemen Tingkat Atas	Ketua, Badan Pengawas dan Pembina/Pelindung	Ketua, Badan Pengawas dan Pelindung	Ketua, Badan Pengawas dan Pelindung
- Manajemen Tingkat Menengah	Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang yang menangani unit-unit usaha	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang yang menangani unit-unit usaha	Sekretaris, Bendahara, Karani dan Kepala Unit Usaha
- Manajemen Tingkat Bawah	Ketua Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
- Masa Kerja Pengurus (tahun)	4	3	3
- Masa Kepemimpinan Ketua KUD yang menjabat sekarang	2 periode	3 periode	3 periode
Pengelolaan Kebun Plasma di Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Petani plasma secara individu tidak mengelola kebun plasma yang dimilikinya. - Teknis pengelolaan kebun di lapangan dilaksanakan oleh kelompok tani. - Pengadaan sarana produksi, pembiayaan kebun, penjadwalan panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD. - Besarnya pendapatan petani plasma dari pengelolaan kebun mereka untuk petani dalam satu kelompok sama besar, sedangkan antar petani lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani plasma secara individu tidak mengelola kebun plasma yang dimilikinya. - Teknis pengelolaan kebun di lapangan dilaksanakan oleh kelompok tani. - Pengadaan sarana produksi, pembiayaan kebun, penjadwalan panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani plasma secara individu bertanggung untuk mengelola kebun plasma yang dimilikinya. - Teknis pengelolaan kebun plasma di lapangan dilakukan oleh petani plasma secara individu. - Pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) dilakukan oleh KUD. Apabila petani membutuhkan sarana produksi, petani mengajukan amprahan ke KUD dan dicatat sebagai hutang petani yang

	kelompok tidak sama tergantung dari besarnya produksi TBS dari masing-masing kelompok taninya.	- Besarnya pendapatan petani plasma dari pengelolaan kebun mereka untuk seuruh anggota koperasi sama, tidak tergantung besarnya produksi dari masing-masing kelompok tani.	akan dibayar oleh petani melalui pemotongan nilai penjualan TBS dari masing-masing petani. - Pengaturan jadwal panen dan penjualan TBS dilakukan oleh KUD, tetapi pelaksanaan panen dilakukan oleh petani sendiri.
--	--	--	---

Tabel 4. Deskripsi Pengelolaan Kebun Plasma

Uraian	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Varietas Bibit	Marihat	Marihat	Marihat
Luas kebun (ha)	1,300	870	920
Jumlah petani plasma (orang)	650	435	460
Luas Kebun/petani plasma (ha)	2	2	2
Populasi tanaman/ha (pohon)	135	135	128
Rata-rata Umur tanaman (tahun)	22	18	26
Produktivitas (ton TBS/ha/tahun)	17.88	22.76	25.31
Produktivitas referensi berdasarkan umur tanaman (ton TBS/ha/tahun)	19	21	17
Penggunaan pupuk anorganik (kg/ha)	425	725	1129
Penggunaan pupuk organik (kg/ha)	0	410 ⁴	0
Penggunaan Amelioran (kg/ha)	0	270 ⁵	0
Penggunaan Pestisida(lt/ha) ⁶	1.00	1.67	1,00

⁴KUD Tani Subur menggunakan pupuk anorganik berupa kompos sebagai pupuk substitusi yang merupakan dampak positif dari implementasi integrasi sawit-sapi.

⁵Amelioran adalah material yang digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Jenis amelioran yang digunakan oleh KUD Tani Subur adalah kapur pertanian (dolomit).

⁶Jenis pestisida yang digunakan di ketiga KUD pada waktu dilakukan penelitian hanyalah herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma di antara baris tanaman dan sekitarnya.

Manajemen Risiko

(1) Risiko Teknis

Risiko teknis (jika terjadi) yang berdampak pada menurunnya hasil panen yang disebabkan oleh faktor alam atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) ditanggung bersama oleh petani yang tergabung pada masing-masing kelompok tani. Untuk meminimalisir risiko teknis, KUD melakukan upaya berikut:

- a) Menerapkan konsep praktik pertanian yang baik (GAP), yaitu: (1) pemupukan tanaman dengan tepat melalui analisis daun berdasarkan hasil uji laboratorium milik PT. Tania Selatan; (2) pengendalian OPT melalui pemantauan intensitas serangan, (3) pemeliharaan kebun dan tanaman secara berkala dan terjadwal, seperti: pruning, pembersihan bokoran, dan pembersihan jalan usahatani. Khusus di KUD Jaya Makmur pada pengendalian organisme tanaman melalui pemantauan intensitas serangan OPT, dengan membentuk Tim Unit Semprot (TUS).
- b) Menerapkan konsep praktik manajemen yang baik (GMP), antara lain; (1) penyusunan rencana kegiatan dengan baik untuk tahun berikutnya dalam rapat anggota tahunan (RAT), (2) pendelegasian wewenang pengelolaan kebun kepada kelompok tani, (3) penjadwalan rotasi panen untuk setiap kelompok tani, (4) menyusun rencana replanting mulai tahun 2018 secara bertahap, (5) menjalin kemitraan dengan stakeholders terkait, misalnya dalam pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran hasil, dan perbankan.

(2) Risiko Finansial

Risiko finansial pada usahatani kelapa sawit terutama berkait dengan fluktuasi harga dan fluktuasi produksi TBS dan keperluan dana untuk pembiayaan kebun. Risiko finansial ditanggung bersama oleh petani

plasmadi masing-masing kelompok tani. Untuk meminimalisir risiko finansial, KUD Dwi Tunggal melakukan beberapa hal berikut:

- a) Mengembangkan unit-unit usaha sebagai diversifikasi sumber pendapatan koperasi.
- b) KUD telah memiliki cadangan dana replanting yang dikumpulkan melalui pemotongan hasil penjualan TBS sebesar 3% sejak tanaman mulai menghasilkan. Cadangan dana replanting digunakan sebagai modal pada unit simpan pinjam.
- c) Menjalin hubungan kerjasama dengan bank komersial.

Khusus di KUD Tani Subur pada tahun 2015 telah menetapkan kebijakan *zero grading*, yaitu menetapkan agar ketika penjualan TBS ke PKS diperoleh persentase *grading* 0%, yang berarti tidak ada lagi potongan berat TBS oleh pihak perusahaan atau pabrik pengolah TBS.

(3) Risiko Sosial

Risiko sosial merupakan risiko yang berkaitan dengan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh hubungan sosial maupun klaim kepemilikan lahan antara anggota, pengurus dan pihak-pihak eksternal. Pada umumnya konflik yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan budaya masyarakat pada daerah masing-masing di KUD Sampel.

- a) Menurut Ketua-ketua KUD sampel, sejak koperasi ini berdiri sampai sekarang belum pernah terjadi konflik yang berkait dengan klaim kepemilikan lahan. Selain itu, keanggotaan koperasi juga melibatkan masyarakat lokal sejak Program PIR-Trans ini dibuka, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir.
- b) Khusus KUD Tani Subur, dalam forum FGD disampaikan memang pernah ada konflik sosial yang bersumber dari ketidakpercayaan anggota KUD terhadap pengurusnya. Upaya untuk meminimalisir risiko sosial yaitu dengan cara: (1) berpartisipasi dalam pembangunan di

desa sekitar, memberikan sumbangan pendidikan, dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, baik anggota KUD maupun yang bukan anggota; (2) memelihara unsur kepercayaan anggota kepada pengurus KUD, melalui berusaha menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan rapat berkala ataupun insidental sesuai dengan keperluan.

- c) Di KUD Jaya Makmur, KUD bekerjasama dengan PT. Inti Indosawit Subur melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh anggota dalam bentuk pelatihan-pelatihan, rapat koordinasi, penyuluhan teknis untuk memecahkan masalah yang diikuti oleh seluruh petani. Untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul

Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Untuk menjamin tersedianya sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan pestisida, masing-masing KUD sampel menjalin kerja sama dengan perusahaan pemasok sarana produksi pertanian, yaitu: (1) KUD Dwi Tunggal menjalin kerja sama dengan CV Rahma Tani yang berada di Lempuing Jaya Kabupaten OKI Sumatera Selatan; (2) KUD Tani Subur menjalin kerja sama dengan PT. Selomas di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah; (3) KUD Jaya Makmur menjalin kerja sama dengan PT. Asia Kimindo Prima di Medan, Sumatera Utara. Untuk pemasaran hasil, masing-masing KUD menjalin kerja sama dengan Perusahaan Mitra yang dulunya merupakan Perusahaan Inti. Untuk saat ini, sebenarnya sudah tidak ada kewajiban KUD untuk menjual hasil TBS-nya kepada Perusahaan Inti, karena kewajiban KUD untuk menjual TBS-nya kepada perusahaan inti sudah berakhir pada saat pembayaran angsuran kredit petani plasma telah lunas, sekitar tahun 1998-2011.

Hubungan kemitraan antara KUD dengan perusahaan mitra, baik yang terkait dengan pasokan sarana produksi maupun

antara penduduk lokal dan penduduk pendatang (transmigrasi), sejak KUD ini dibentuk yang tidak terlepas dari Program PIR-Trans di wilayah ini telah melibatkan penduduk lokal sebagai peserta proyek.

(4) Risiko Hukum

Risiko hukum berkaitan dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab hukum oleh koperasi serta pengurus dan anggotanya, atau sengketa hukum yang melibatkan pihak-pihak tersebut. Risiko ini tidak pernah terjadi di KUD sampel. Koperasi berdiri secara resmi dengan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Instansi terkait. Selain itu, semua lahan petani plasma telah memiliki sertifikat resmi berupa Hak Milik.

pemasaran hasil tersebut didasarkan pada aspek kepercayaan, tidak ada perjanjian tertulis terbaru setelah pelunasan kredit petani plasma tersebut. Menurut pengakuan para Ketua KUD, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, KUD tidak pernah menjual TBS-nya kepada perusahaan lain.

Kinerja Operasional dan Keuangan Koperasi serta Dampak Sosial Ekonomi

(1) Kinerja Operasional

Jika dilihat dari rata-rata umur tanaman dan rata-rata produktivitas yang dicapai, tampak bahwa kinerja dari ketiga KUD sampel dalam mengelola perkebunan plasma perkebunan kelapa sawit rakyat termasuk kategori baik dengan indikasi sebagai berikut: (1) di KUD Dwi Tunggal dengan rata-rata umur tanaman 22 tahun mampu mencapai produktivitas rata-rata sebesar 17,88 ton TBS/ha/tahun, memang lebih rendah dari tingkat produktivitas idealnya sebesar 19 ton TBS/ha/tahun (Kiswanto, dkk 2008), tetapi lebih tinggi dibanding produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat nasional sebesar 16,56 ton TBS/ha/tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015); (2) di

KUD Tani Subur, dengan rata-rata umur tanaman 18 tahun mampu mencapai produktivitas rata-rata sebesar 22,76 ton TBS/ha/tahun; (3) di KUD Jaya Makmur, dengan rata-rata umur tanaman 25 tahun mampu mencapai produktivitas rata-rata sebesar 25.31 ton TBS/ha/tahun.

Tampak bahwa produktivitas tanaman yang dicapai oleh KUD Jaya Makmur sangat tinggi, karena pada umumnya pada umur tanaman tersebut produktivitas tanaman kelapa sawit telah menurun kurang dari 20 ton TBS/ha/tahun. Jika dikaitkan antara besarnya produktivitas tanaman dengan jumlah pupuk yang digunakan, tampaknya ada korelasi positif antara banyaknya pupuk yang digunakan, terutama penggunaan pupuk anorganik dengan besarnya produktivitas yang dihasilkan.

Berdasarkan deskripsi pengelolaan kebun plasma sesuai dengan Tabel 4, terlihat

Pendapatan rumah tangga petani dari kebun plasma tersebut merupakan pendapatan non-kerja⁷. Selain dari kebun plasma, petani plasma anggota koperasi di kedua KUD tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari berbagai kegiatan produktif lainnya, antara lain: (1) usahatani perkebunan kelapa sawit mandiri; (2) usahatani perkebunan karet⁸; (3) usahatani tanaman pangan dan hortikultura; (4) berusahatani ternak; (5) bekerja sebagai buruh pada perkebunan-perkebunan kelapa sawit, baik di perusahaan perkebunan atau di kebun kelapa sawit yang

bahwa penerapan GAP memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan tingkat produktivitas yang jauh di atas rata-rata produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat secara nasional.

(2) Kinerja Keuangan Koperasi dan Kebun Plasma

Keberadaan koperasi petani perkebunan kelapa sawit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan pendapatan rumah tangganya (Tabel 5). Di KUD Dwi Tunggal rata-rata petani memperoleh pendapatan dari kebun plasma sebesar IDR 29,5 juta/tahun atau sebesar IDR 2,5 juta /bulan, dan di KUD Tani Subur rata-rata petani memperoleh pendapatan sebesar IDR 33,6 juta/tahun, atau sebesar IDR 2,8 juta/bulan.

dikelola oleh KUD; (6) berwirausaha sebagai pedagang dan usaha jasa.

Di KUD Jaya Makmur, karena pengelolaan teknis dan finansial kebun plasma dikelola sendiri oleh petani secara individu, maka pendapatan petani merupakan keuntungan dari usahatani perkebunan kelapa sawitnya dan imbalan dari curahan tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengelola kebunnya, sehingga rata-rata pendapatan petani dari usaha perkebunan plasma kelapa sawit di KUD Jaya Makmur paling tinggi yaitu mencapai Rp 59,3 juta/tahun atau sebesar Rp 4,9 juta/bulan, dari rata-rata luas perkebunan petani sebesar 2 ha. Namun, peluang petani untuk memperoleh pendapatan dari sumber lain di luar perkebunan kelapa sawit relatif terbatas karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mengelola kebun plasma yang dimilikinya.

Dengan berbagai unit usaha yang diusahakan oleh KUD sampel, diketahui kondisi keuangan koperasi sampel seperti terlihat pada Tabel 6. Keuntungan dalam usaha koperasi di Indonesia disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Dari ketiga KUD

⁷ Petani plasma anggota KUD Dwi Tunggal dan KUD Tani Subur tidak mengelola kebun plasma yang mereka miliki. Pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh KUD. Oleh karenanya pendapatan yang mereka peroleh dari pengelolaan kebun plasma disebut sebagai pendapatan non-kerja, karena untuk memperoleh pendapatan tersebut petani tidak bekerja sama sekali.

⁸ Khusus di KUD Dwi Tunggal, semua petani plasma anggota KUD memiliki kebun karet dengan luas rata-rata 0,50 hektar, yang diusahakan di lahan pekarangan.

Sampel, ternyata SHU pada KUD Tani Subur paling besar, yaitu sebesar IDR 729,6 juta dan terkecil pada KUD Jaya Makmur sebesar IDR 176,02 juta. Keuntungan atau SHU dari KUD tidak semua dibagikan kepada anggota. Pendistribusian SHU adalah untuk: (1) Bagian Anggota; (2) Dana cadangan koperasi; (3) Manajemen fee; (4) Gaji karyawan; (5) Dana pendidikan; (6) Dana sosial; (7) Dana pembangunan daerah kerja. Persentase distribusi SHU untuk ketiga KUD sampel seperti terlihat pada Gambar 1.

(3) Kesejahteraan Petani

Keberadaan proyek PIR-Trans kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi di ketiga KUD sampel terbukti mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berstatus sebagai anggota KUD. Indikator-indikator kesejahteraan tersebut antara lain: (1) Kondisi perumahan penduduk; (2) Kepemilikan kendaraan bermotor; (3) Tingkat pendidikan anak; dan (4) Indikator lainnya, khususnya bagi petani yang beragama Islam telah mampu menunaikan ibadah haji atau umrah, atau sudah tercatat dalam daftar tunggu sebagai calon jamaah haji. Secara rinci indikator kesejahteraan anggota KUD sampel seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 5. Analisis Pendapatan Petani dari Pengelolaan Kebun Plasma

Uraian	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Luas Lahan (ha)	2.00	2.00	2.00
Produksi TBS(kg)	35,760	44,166	50,615
Harga TBS (IDR/kg)	1,121.29	1,382.00	1,454.00
Penerimaan (IDR)	40,097,330	61,037,412	73,594,520
Biaya Pemeliharaan (IDR) ⁹	7,023,500	18,342,864	8,261,101
Biaya Pemasaran (IDR) ¹⁰	3,570,240	9,094,851	6,015,340
Biaya Total (IDR)	10,593,740	27,435,715	14,276,441
Pendapatan (IDR)	29,503,590	33,601,697	59,318,078
MarjinKeuntungan (%)	73.58	55.05	80.60
Dana ditahan oleh KUD untuk Cadangan Replanting dan Simpanan Wajib (Rp) ¹¹	1,571,950	5,760,342	607,636

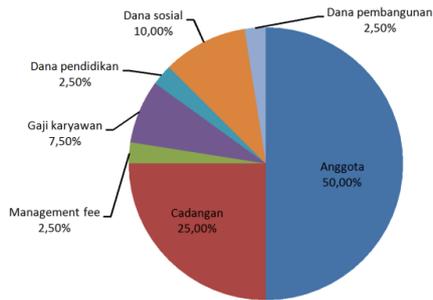
Tabel 6. Deskripsi Kondisi Finansial KUD dan Rantai Pasok

Kriteria	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Omset KUD	4,904,448,481	1,462,008,939	2,188,506,750
Biaya Operasional	4,396,412,352	732,368,710	2,012,484,939
Sisa Hasil Usaha (SHU)	508,036,129	729,640,229	176,021,811
SHU Tidak Dibagikan	254,018,065	401,302,126	105,613,087
SHU Dibagikan	254,018,065	328,338,103	70,408,724

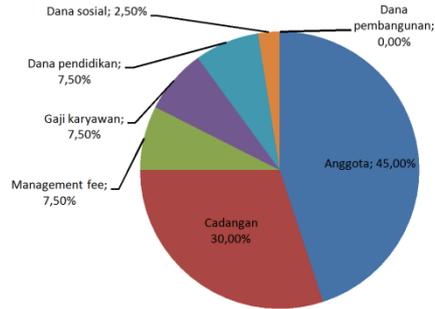
⁹Biaya pemeliharaan terdiri atas biaya input dan biaya teraga kerja, termasuk tenaga kerja untuk penen

¹⁰Biaya pemasaran terdiri atas biaya angkut, biaya timbang dan grading.

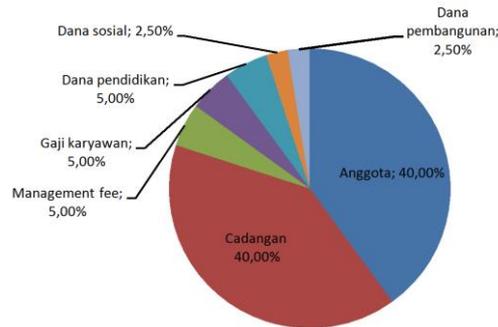
¹¹Total potongan untuk setiap petani plasma berupa; simpanan wajib anggota sebesar Rp 10.000 per bulan, dan dana cadaangan untuk replanting .



Distribusi SHU pada KUD Dwi Tunggal



Distribusi SHU pada KUD Tani Subur



Distribusi SHU pada KUD Jaya Makmur

Gambar 1. Distribusi Pembagian SHU Ketiga KUD Sampel

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Keberadaan koperasi pada komunitas petani perkebunan kelapa sawit terbukti sangat penting. Dengan membentuk koperasi, petani dapat mengelola perkebunannya lebih efisien dan mampu menerapkan konsep GAP dan GMP yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kebunnya lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat secara nasional.
2. Kemitraan (*partnership*) merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan koperasi petani perkebunan kelapa sawit dalam mengelola kebun plasma petani anggotanya. Dengan menjalin

kemitraan dengan supplier sarana produksi, koperasi dapat memperoleh jaminan pasokan sarana produksi pertanian (*farm supplies*), dan dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan inti sebagai pembina, koperasi memperoleh pembinaan tentang GAP dan GMP serta ada jaminan pemasaran hasil dari kebunnya.

3. Pola pengelolaan kebun di lapangan sebagaimana diterapkan oleh KUD Dwi Tunggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dimana pengelolaan kebun di lapangan menjadi tanggung jawab ketua kelompok tani dan pembagian hasil dibagi sama rata untuk seluruh anggota kelompok tani, dan Pola pengelolaan kebun di lapangan di KUD Tani Subur di

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dimana pengelolaan kebun menjadi tanggung jawab ketua kelompok tani, tetapi pembagian hasil kebun dibagi sama rata untuk seluruh anggota koperasi, tampaknya lebih baik dibanding Pola pengelolaan kebun petani plasma di Koperasi Jaya Makmur di Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana pengelolaan kebun menjadi tanggung jawab petani anggota KUD secara individu. Kelemahan utama dari pola pengelolaan kebun di KUD Jaya Makmur adalah rendahnya kekompakan dan kebersamaan yang menjadi roh dalam berkoperasi.

4. Dengan bergabung dalam koperasi, petani perkebunan kelapa sawit rakyat dapat mengajukan sertifikasi untuk memperoleh sertifikat berkait dengan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawitnya yang ramah pada lingkungan, baik secara nasional (ISPO) maupun internasional (RSPO) dan ISCC, yang pada gilirannya akan meminimalisir hambatan bagi penjualan hasil perkebunan kelapa sawit rakyat pada pasar internasional.

Rekomendasi

1. Pola pengelolaann koperasi untuk petani kecil seperti yang diterapkan oleh KUD Tani Subur di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijadikan sebagai model pengembangan koperasi petani kecil secara nasional. Beberapa kelebihan KUD Tani Subur dibanding KUD lainnya adalah:
 - a. KUD Tani Subur telah melaksanakan fungsi bisnisnya secara profesional layaknya sebuah perseroan, dimana anggota koperasi bertindak sebagai pemegang saham utama.
 - b. Keanggotaan koperasi tidak terbatas pada petani plasma saja tetapi juga terbuka untuk anggota masyarakat lainnya yang bukan petani plasma.
 - c. KUD Tani subur mampu mengembangkan banyak unit usaha yang mempunyai prospek bisnis dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada dan mampu membaca peluang pasar.
 - d. Dengan menerapkan konsep *Integrated Farming* yang berupa Integrasi Sawit-Sapi, KUD Tani Subur selain telah melaksanakan bisnis dengan mempertimbangkan prinsip *pro-job* (menciptakan lapangan pekerjaan), *pro-poor* (meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan anggota masyarakat lainnya), juga telah menerapkan prinsip *pro-green*, dimana KUD Tani Subur mampu memanfaatkan limbah dari usaha perkebunan kelapa sawit untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pakan ikan, dan memanfaatkan limbah peternakan untuk perkebunan kelapa sawitnya sebagai pupuk substitusi. Dengan konsep *integrated farming* Sawit-Sapi ini KUD Tani Subur telah berusaha untuk melakukan upaya *minimize wastedan* membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - e. KUD Tani subur tercatat sebagai salah satu koperasi terbaik nasional pada tahun 2014.
2. Keberhasilan KUD Dwi Tunggal bersama enam KUD lainnya yang tergabung dalam Perhimpunan Sapta Tunggal Mandiri dibawah binaan dari PT Tania Selatan (Wilmar Group) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam memperoleh sertifikat RSPO dapat dijadikan sebagai model untuk pelaksanaan sertifikasi *sustainabilly* pada perkebunan kelapa

sawit rakyat secara nasional dengan alasan sebagai berikut:

- a. Melalui perhimpunan atau gabungan KUD tersebut skala usaha perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi lebih besar sehingga lebih efektif dan efisien bagi lembaga sertifikasi untuk melaksanakan assessment di lapangan.
- b. Prinsip dan kriteria (P & C) yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi lebih mudah dilaksanakan oleh KUD dan lebih mudah dalam pengawasannya oleh perhimpunan atau gabungan KUD tersebut, dan pembinaan oleh perusahaan mitra dalam rangka pengajuan sertifikasi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Tabel 7. Indikator Kesejahteraan Anggota Koperasi Sampel

Kriteria	KUD Dwi Tunggal	KUD Tani Subur	KUD Jaya Makmur
Kondisi perumahan(%)			
- Permanen	90	90	99
- Semi-permanen	10	10	1
Kepemilikan kendaraan (%)			
- Sepeda motor	100	100	100
- Mobil	7.60	10	8.70
Tingkat Pendidikan Anak (%)			
- Lulus SD/Sederajat	100	100	100
- Lulus SMP/Sederajat	100	100	100
- Lulus SMA/Sederajat	60	70	70
- Lulus Perguruan Tinggi	10	10	10
Indikator kesejahteraan lainnya (%)			
- Petani yang beragama Islam yang sudah menunaikan Ibadah Haji atau Umrah atau telah terdaftar dalam daftar tunggu sebagai calon jemaah haji.	30	10	45

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Indonesia 2016 (Statistical Yearbook of Indonesia 2016). Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik. Badan pusat Statistik. Jakarta.

_____. 2016. Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2015. Badan pusat Statistik. Jakarta.

_____. 2014. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, Dan Tebu Tahun 2014. Berita Resmi Statistik No. 93/12/Th. XVII, 23 Desember 2014. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- _____. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015 Kelapa Sawit. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Glenday, Skye; Yusurum Jagau; Suharno, Agnes Safford. 2015. *Central Kalimantan's Oil Palm Value Chain: Opportunity for Productivity, Profitability and Sustainability Gains. Supported by: Cental Policy Initiatif (CPI), Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya and Palangka Raya Institue for Land Use and Agricutkural Reserach (PILAR)*. <http://climatepolicyinitiative.org/publication/> diakses tanggal 20 Agustus 2016
- Kementerian Perdagangan. 2016. Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi) Periode: 2011-2016. <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/> Indonesia-export-import Diakses tanggal 20 Agustus 2016.
- Kementerian Pertanian 2013. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. Jakarta.
- Kiswanto, Jamhari Hadi Purwanto dan Bambang Wijayanto. 2008. Teknologi Budidaya Kelapa Sawit. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.
- Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. 1996. Keputusan Bersama Nomor: 73/Kpts/OT.210/2/98 dan Nomor: 01/Skb/M/III/1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 1992. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- _____. 1986. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1986, Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. Jakarta.
- Suharno, Yuprin Abel Dehen, Betrixia Barbara and Juliarta Bramansa Ottay. 2015. *Opportunities for Increasing Productivity & Profitability of Oil Palm Smallholder Farmers in Central Kalimantan. Supported by: Cental Policy Initiatif (CPI), Green Works Asia, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya and Palangka Raya Institue for Land Use and Agricutkural Reserach (PILAR)*. <http://climatepolicyinitiative.org/publication/> diakses tanggal 20 Agustus 2016